

BAB III

PERAN PBB DAN DINAMIKA PERMASALAHAN HUMAN SECURITY

Hubungan antar negara pada prinsipnya bagaimana suatu organisasi adalah untuk lebih terjaminnya pencapaian kepentingan masing-masing negara ataupun warga negara dan negara-negara yang bergabung dalam suatu organisasi internasional, sehingga kepentingannya itu tidak terganggu dan tercapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Dengan demikian suatu organisasi internasional mencakup aspek yang cukup luas dari seluruh aspek kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan bersama, seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan bahkan sampai kepada bentuk pertahanan dan keamanan bersama.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan itulah suatu organisasi internasional dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, tergantung dari kepentingan yang dimaksudkan dalam pembentukannya atau maksud dan tujuan organisasi internasional itu dibentuk.

A. Fungsi dan Wewenang PBB

Persatuan Bangsa-Bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt dan digunakan pada tanggal 1 juni 1942, ketika wakil-wakil dari 26 negara mengemukakan jaminan pemerintah untuk meneruskan peperangan bersama melawan front Jerman, Itali, dan Jepang.¹

Dalam penyelesaian konflik dan memelihara perdamaian PBB memiliki Dewan keamanan yang bertanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan juga bertindak sesuai dengan tujuan serta asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 4 piagam PBB menetapkan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif, maka negara-negara anggota menyerahkan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui bahwa Dewan Keamanan akan melaksanakan semua kewajibannya dibawah tanggung jawab ini.

Berdasarkan piagam, fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan adalah:

1. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹ May T. Rudy, Administrasi & Organisasi Internasional. Diterbitkan PT. Refika Aditama, Bandung 2009. Hal. 56

2. Menyelidiki pertikaian apa saja, atau keadaan yang dianggap bias menyebabkan pertentangan internasional.
3. Memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian pertikaian atau ketentuan-ketentuan penyelesaian.
4. Memformulasikan rencana pembentukan suatu sistem untuk mengatur persenjataan.
5. Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil.
6. Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi atau tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Mengambil tindakan militer terhadap aggressor.
8. Merekomendasikan diterimanya anggota baru dari jangka waktu di mana negara bisa menjadi pihak dari status Mahkamah Internasional.
9. Melaksanakan fungsi perwalian dari “wilayah-wilayah strategis” Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10. Merekomendasikan kepada Majelis Umum pengangkatan Sekretaris Jenderal dan bersama-sama dengan Majelis Umum, memilih para Hakim Mahkamah Internasional.²

² *United Nations Department of Public Information, op.cit,hal.79-82*

Sebagai organisasi internasional yang bersifat umum atau universal yang memiliki sebuah tujuan tankan tunya, PBB akan selalu melakukan tugasnya dengan maksimal agar PBB dapat menuai hasil yang memuaskan dalam setiap melakukan kegiatannya. Dalam melakukan setiap perannya PBB akan menitikberatkan semua aktifitasnya kepada sebuah tujuan yang diharapkan oleh para anggotanya yang tergabung dalam organisasi internasional PBB tersebut maupun pihak-pihak yang sedang dibantu. Salah satu tujuan PBB yang menjadi priorotas pertama sejak awal berdirinya, serta bagian utama dari tanggung jawab PBB adalah untuk memelihara perdamaian internasional dan kemanan dunia. Maka, sejak saat itu juga PBB telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk mencegah sebuah tindakan atau aktifitas dari sebuah konflik yang terjadi dalam hal ini yang akan mengarahkan kepada sebuah bentuk peperangan.

Kekuasaan yang lebih luas lagi diberikan oleh piagam agar Dewan Keamanan dapat menyelenggarakan kebijakan PBB itu dengan cepat dan pasti. Dalam hal ini Dewan bertindak terhadap dua macam persengketaan:

1. Persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan kemanan internasional.
2. Peristiwa yang mengancam perdamaian dan agresi.

Organisasi internasional PBB yang telah berdiri pada tanggal 24 oktober 1945, dalam setiap hal yang berkaitan dengan salah satu tujuannya

yaitu memelihara perdamaian internasional dan kemanan internasional tersebut akan berusaha memilih untuk melakukan tindakan yang mendorong pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menggunakan cara perundingan damai tanpa kekerasan atau dengan kekuatan senjata dan juga PBB sebagai organisasi internasional akan memilih untuk membantu memulihkan dan memperbaiki keadaan menjadi damai ketika sebuah konflik terjadi.³

Dukungan atas peran PBB dalam kondisi konflik internasional tersebut telah memperlihatkan hasil-hasil yang cukup baik selama ini, seperti contohnya PBB membantu dalam mendukung perdamaian yang terjadi di Darfur, Sudan pada tahun 2003, dukungan lain juga dilakukan PBB tidak hanya dalam bentuk perjanjian perdamaian tetapi juga masalah kemanusiaan seperti kesehatan yang mendapat dukungan dari agen PBB di Afrika utara untuk membantu mengurangi penyebaran wabah parasite dukungan serta bantuan makanan di tahun 2001, dimana PBB dengan program WWF nya telah mendistribusikan 4,2 miliar ton makanan kepada 77 miliar jiwa hampir 82 negara diman dengan total dana yang dikeluarkan sebesar 1,75 triliun dollar.⁴

Kembali pada sebuah konflik, dalam setiap kondisi konflik sebuah dukungan tidak hanya mengharapkan bantuan yang berupa materi saja seperti makanan, obat-obatan, dan sebagainya melainkan juga bantuan untuk

³ *Basic Fact Of United Nations*, hal.67

⁴ www.UN.org, diakses pada tanggal 17 maret 2008

mengamankan keadaan agar menjadi tenang. Keinginan lain yang diharapkan dari bantuan dan dukungan terutama dari organisasi internasional PBB adalah keinginan dan dukungan untuk menyelesaikan konflik atau bahkan mencegah konflik itu terjadi. Maka, PBB sebagai organisasi internasional dalam kaitannya dengan usaha pemeliharaan perdamaian, sesuai dengan piagam PBB yang telah membuat suatu keinginan bersama dalam memelihara perdamaian internasional dimana telah di buat beberapa hal yang dapat dijadikan oleh PBB dalam hubungannya dengan pemeliharaan perdamaian diatas diantaranya yaitu perjanjian perdamaian atas konflik (*Peacefull Settlement of Disputes*), operasi pemeliharaan perdamaian (*Peacekeeping Operations*), dan keamanan bersama (*Collective Security*).

B. Peran PBB dalam Konflik Internasional

Dari tiga hal diatas, hal yang seringkali dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik atau membantu memelihara perdamaian adalah *Peacefull Settlement of Disputes* (kesepakatan perdamaian suatu konflik). Dalam hal ini, *Peacefull Settlement* adalah cara untuk penyelesaian persengketaan atau pertikaian internasional tanpa paksaan, dimana penyelesaian internasional itu dua tehnik hukum yang meliputi penerapan

hukum internasional untuk memperoleh fakta persengketaan dan tehnik politik yang meliputi prosedur diplomatic.⁵

Salah satu tujuan utama PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdirinya, PBB sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak supaya tidak menggunakan meja konfrensi dan bukannya kekuatan persenjataan, atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik muncul. Selama puluhan tahun PBB telah membantu mengakhiri sejumlah konflik, sering melalui tindakan dewan keamanan (organ utama dalam menanggulangi masala-masalah perdamaian dan keamanan internasional).

Selama tahun 1990, telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam pola konflik dan dalam cara bagaimana komunitas internasional memberikan tanggapan terhadap konflik. Selain salah satu penyebabnya adalah bahwa lebih dari 90 persen dari konflik belakangan ini berlangsung di dalam negara dan bukannya antar negara.⁶ Dengan demikian, PBB membentuk dan meningkatkan kembali jangkauan peranannya yang berada di bawah komandonya, dengan memberikan tekanan pada pencegahan konflik.

PBB secara terus menerus mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Dalam usahanya,

⁵ Jack C.Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, PT. Putra A Bardin, 1999, hal. 207

⁶ *Basic Fact about United Nations; United Nations Information Centre*, 1995, hal.74

PBB banyak melibatkan organisasi-organisasi regional dan memperkuat pembangunan perdamaian pasca konflik. Konflik-konflik sipil telah memunculkan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan respon komunitas internasional.⁷

Sesuai dengan charter PBB (pasal 33) dengan menggunakan teknik politik yang meliputi prosedur diplomatic. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh PBB, sesuai dengan aturan yang telah ada dengan menawarkan penyelesaian masalah dengan damai dibandingkan dengan menggunakan kekerasan, diantaranya:

Pertama adalah peran negosiasi, negosiasi adalah teknik diplomatic untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional dimana tujuan perundingan dapat diperoleh dan dipenuhi melalui jalan kompromi dan penyesuaian yang diperoleh melalui kontak hubungan secara langsung. Hal lain dalam negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral.

Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang

⁷ *Ibid*

dibedakan. Negosiasi ketika sengketa belum muncul yang lebih dikenal dengan konsultasi, dan negosiasi ketika sengketa telah muncul.⁸

Kedua adalah Enquiry, merupakan sebuah proses pencarian fakta oleh tim yang netral sebagai investigator. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta – fakta para pihak yang tidak disepakati. Penyelesaian sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta – fakta yang terjadi di lapangan. Fakta – fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta – fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.⁹

Ketiga mediasi, merupakan suatu cara yang menyangkut saran – saran mengenai cara penyelesaian oleh pihak ketiga atau mediator. Ketika negara – negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid, hal.207*

dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memebrikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰

Keempat adalah konsiliasi, konsiliasi sama seperti mediasi penyelesaian sengketa melalui konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak.

C. Kondisi Human Security Pasca Revolusi

Masyarakat Mesir tengah melewati dua tahun dari lengsernya Hosni Mubarak, dictator Mesir, tapi akibat konflik politik yang terjadi, masyarakat Mesir berada dalam kondisi yang memperhatikan. Pasca tumbangya Hosni Mubarak dari kekuasaan pada awal 2011, rakyat Mesir berharap ketenangan dan stabilitas dapat kembali dalam kehidupan mereka. Pada awalnya, akibat ketamakan militer, Mesir terlibat konflik internal yang menyebabkan instabilitas dan kekacauan yang berujung pada banyak warga yang tewas dan luka-luka. Sekalipun demikian rakyat Mesir tetap membela revolusinya yang menyebabkan militer Mesir terpaksa menyelenggarakan pemilu legislative. Hal ini telah menciptakan situasi yang kondusif bagi peralihan kekuasaan kewakil-wakil rakyat dan dibentuknya pemerintahan pertama pasca lengsernya Mubarak.

¹⁰ *United Nations Department of Public Information, op.cit., hal.27.*

Proses transformasi Mesir masih mengarah pada konflik politik dan menyebabkan munculnya kembali kekacauan, aksi kekerasan dan instabilitas keamanan. Ketidak teraturan ini sampai pada titik dimana revolusi baru Mesir menghadapi ancaman besar “revolusi dalam revolusi”.¹¹

Kondisi Mesir pasca revolusi sangat erat dengan kekerasan dan kekacauan yang memiliki dampak yang sangat penting. Efek sosial dari kondisi yang ada di Mesir menjadi sangat penting, karena hasil dari instabilitas ini sangat berdampak pada banyak bidang, terutama bidang budaya dan efeknya akan terus berlanjut hingga beberapa tahun. Bila kondisi politik sosial ini terus berlanjut ditengah masyarakat Mesir, maka akan terjadi penyimpangan sosial di negara ini seperti pengangguran, inflasi pencurian, krisis moral, lemahnya institusi keluarga, berkurangnya budaya sipil, saling tidak percaya antar sesama anggota dan hilangnya kepercayaan kepada struktur kekuasaan.

Kondisi human security pasca revolusi Mesir, masyarakat Mesir mengalami banyak dampak negative, menurut laporan UNDP tahun 1994 tentang human development report, keamanana manusia dikategorikan menjadi tujuh, yaitu kemananan pangan, kemananan ekonomi, kemanan kelompok, keamanana individu, kemanana lingkungan, kemananan kesehatan, dan keamanan politik.¹² Di Mesir hampir mencakup semua ketujuh kategori

¹¹ *Ibid*

¹² D.M. Nault, “Human Security in Asia”, Japan, Global Studies Press, 2007, hal.220

tersebut. Pada revolusi keamanan pangan kurang mencukupi dikarenakan banyak warga Mesir yang kekurangan pasokan pangan pada saat aksi demonstrasi. Keadaan keamanan ekonomi sangat jelas menurun, warga Mesir melakukan mogok kerja, sektor pariwisata yang merupakan pemasukan cukup besar mengalami penurunan dikarenakan jalur menuju objek wisata tidak difungsikan akibat aksi demonstrasi. Keadaan keamanan personal atau individu di Mesir akibat aksi demonstrasi mengakibatkan rakyat tidak memiliki rasa percaya diri, tidak ada lagi rasa saling mempercayai terhadap pemerintah, dan gangguan mental.

Pasca revolusi, Mesir mengalami kenaikan dramatis proporsi anak muda berusia 15 – 20 tahun dalam jumlah seluruh penduduk. Aksi protes dilakukan oleh anak muda melalui media sosial. Merekalah yang mengorganisasikan protes dan demonstrasi – demonstrasi. Merekalah yang mengatur strategi dan merekalah yang menyebar luaskan rencana dan aksi melalui media sosial, internet, Facebook, dan Twitter yang kemudian ditangkap televisi satelit dan disebarluaskan ke seluruh dunia.

Demonstrasi menentang dekrit Presiden 22 November rancangan konstitusi memang bukan hal baru. Sejak presiden menerbitkan dekrit 22 November, yang memberikan kekuasaan sangat besar kepada presiden, gelombang demonstrasi dari kubu oposisi terus terjadi. Seperti setahun sebelumnya ketika rakyat dari berbagai lapisan masyarakat turun ke Tahrir

bersama-sama menentang rezim yang berkuasa yaitu Mubarak. Kini kembali bersatu menentang presiden Mursi pasca revolusi yang baru enam bulan dipilih, presiden yang menurut pandangan mereka sudah menjelma menjadi dictator baru.

Masalah *human security* yang muncul pasca revolusi Mesir adalah pemerintah Mesir yang tidak dapat melindungi keamanan manusia terutama dalam dimensi politik. Kesempatan masyarakat untuk menggunakan hak – hak politiknya terhambat oleh batasan – batasan yang dibuat oleh pemerintah sehingga timbul ketakutan terhadap kebebasan masyarakat, misalnya dalam menyuarakan pendapat. Kemungkinan mereka akan diadili oleh pemerintah karena dianggap pemberontak dan mengganggu keamanan negara. Selain itu mereka sulit mendapatkan apa yang mereka mau.¹³ Esensi dasar dari *human security* seperti *freedom from want* dan *freedom from fear* sulit dicapai ditengah kediktatoran pemimpin Mesir.

D. Peran PBB dalam Menangani Human Security

Human security secara umum adalah keamanan yang mengutamakan individu agar menjaga kebebasan dasar melindungi dari ancaman luar. Menurut Thomas Hobbes, masyarakat memberikan sebagian keamanan mereka kepada negara, lalu negara menjamin keamanan masyarakat untuk

¹³ “*The Role of Media Support Human Security in Egypt Revolution*”, diakses melalui <http://www.jurnalsarahdwita.com>, diakses jumat, 11 Juli 2014.

hidup sejahtera dengan kedaulatan. Setiap warga negara boleh memiliki hak protes kepada pemerintah yang dianggap tidak mendapat melindungi human security mereka karena pemerintah kehilangan legitimasi politik dan ekonomi secara moral untuk melindungi negara dan tuntutan masyarakat agar negara bisa menjamin keamanan yang telah diberikan.

Human Security merupakan suatu istilah atau konsep yang dipakai dalam memahami permasalahan global yang menyangkut keamanan manusia secara individu dalam sebuah populasi. Setelah perkembangannya pasca perang dingin, kajian keamanan tidak hanya mencakup keamanan negara dan mempertahankan kedaulatan. Aspek keamanan sangat meluas dan dikaji dalam berbagai hal. Saat ini banyak menjadi sebuah ancaman negara tidak hanya dalam bidang militer. Aspek lainnya berkembang semakin luas dan kompleks seperti human security.

Definisi *human security* pertama kali dikeluarkan oleh *United Nation Development Program* pada tahun 1994 mengatakan bahwa kemanan global harus diperluas dan kemudian terbagi menjadi 7 dimensi yaitu *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security*.¹⁴ *Human security* menjadi pembahasan yang sangat menarik serta banyaknya fenomena – fenomena yang berkaitan dengan keamanan manusia. Konsep keamanan yang dimaksudkan adalah pemenuhan perlindungan pada aspek politik, sosial,

¹⁴ *United Nation Development Programme, Human Security.*

ekonomi, personal, pangan, lingkungan, genosida, dan lain sebagainya. Human security sangat berkaitan dengan dua hal yaitu keamanan atau kebebasan terhadap ancaman dan perlindungan terhadap penderitaan.

Masalah *human security* yang muncul pasca revolusi dimesir adalah masalah sosial, politik, dan ekonomi. Pada saat itu banyak dampak negatif yang muncul pada rakyat Mesir salah satunya dampak revolusi Mesir bagi kaum minoritas. 8 juta orang Kristen ketakutan dan menuntut keadilan akibat pembakaran, pengrusakan, dan pengeboman gereja pada saat demonstrasi penurunan Mubarak. Masalah lainnya kerusuhan dan menurunnya keamanan sosial warga menyebabkan meluasnya fenomena negative di tengah masyarakat yang biasanya memiliki substansi ekonomi. Meningkatnya angka pengangguran dan meluasnya ketidakamanan ditengah – tengah masyarakat.

Human security sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri oleh Kanada. Dalam hali ini, politik luar negeri fokus pada “freedom from pervasive threats to peoples right safety or lives” atau lebih dekat pada “freedom from fear”. Pada tahun 1990, dewan keamanan PBB berinisiatif memasukkan isu – isu high politics. PBB lebih ke terfokus dalam mencegah krisis kemanusiaan, sosial ekonomi untuk mencegah konflik, dan membngun kembali masyarakat pasca perang. Konsep human security ini sempat mengalami kegagalan pasca perang dunia II yang disusul dengan perang

dingin. Pada masa itu, konsep national security lebih mendominasi mengingat pada masa itu dunia masih dilingkupi oleh perang antar negara.

Konsep *human security* kembali mengemuka pasca perang dingin pada awal tahun 1990. Hal ini didukung dengan adanya keinginan PBB atas desakan negara-negara dunia ketiga agar PBB berperan aktif dalam mengantisipasi perkembangan isu – isu global kontemporer pasca perang dingin. Isu – isu global yang serius seperti HAM, lingkungan, kesehatan, kemiskinan, dan teknologi.

Keinginan PBB untuk berperan aktif dalam perkembangan human security ini ditegaskan dalam laporan tentang pembaharuan PBB. PBB akan lebih berperan, terutama dalam melaksanakan lima misi utamanya yaitu:

1. Perdamaian dan keamanan
2. Masalah – masalah ekonomi sosial
3. Kerjasama pembangunan
4. Masalah – masalah kemanusiaan
5. Penegakan HAM ¹⁵

Upaya yang dilakukan PBB dalam human security yang terjadi di Mesir pasca revolusi, PBB memperingati melalui sebuah konstitusi. Komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperingati Mursi fakta bahwa pemerintahannya naik ke puncak kekuasaan melalui protes serupa, ia

¹⁵ *United Nations, Renewing the United Nations, hal.23-26*

harus sangat sensitive terhadap kebutuhan untuk melindungi hak – hak para demonstran untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.